

PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA KENDARI

¹ Karnila Haeruddin, ² Adrian Tawai, ³ Muh. Yusuf

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo

karnilahaeruddin@gmail.com , adriantawai@uho.ac.id, muh.yusuf@uho.ac.id

Kota Kendari - Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to determine the application of the principles of good governance to the effectiveness of regional development planning in Kendari City. The population in this study were all employees of the Kendari City Regional Development Planning Agency (Bappeda), amounting to 143 people. In addition, in determining the sample, it took 25% of the total population of 143 people to produce a value of 35.75 and was filled into 36 people. So the sample in this study amounted to 36 people. In addition to the data obtained from the samples obtained, in completing the data the researcher also obtained information from outside communities or government elements who knew the problem being discussed. The results showed that the application of the principles of good governance in Bappeda Kendari City in terms of the 3 main principles of Good Governance namely accountability, transparency and participation were quite good. This means that the Kendari City Bappeda has implemented good governance. On the other hand, the effectiveness of development planning in Bappeda Kendari City has fulfilled three dimensions. Namely implementative, applicable, in strategic planning. In this case the three dimensions show good and adequate categories.

Keywords: Application of Principles; Development Planning; Good Governance

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip *good governance* terhadap efektivitas perencanaan pembangunan daerah Kota Kendari. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari yang berjumlah 143 orang. Selain itu dalam penentuan sampel, maka mengambil 25% dari jumlah populasi 143 orang sehingga menghasilkan nilai 35,75 dan dikenakan menjadi 36 orang. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 36 orang. Selain data yang diperoleh dari sampel-sampel yang didapat, dalam melengkapi data peneliti juga memperoleh informasi dari masyarakat luar atau unsur pemerintah yang mengetahui masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari di tinjau dari 3 prinsip pokok *Good Governance* yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipasi sudah cukup baik. Artinya bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari sudah menerapkan *Good Governance* atau pemerintahan yang baik. Disisi lain, efektivitas perencanaan pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari sudah memenuhi tiga dimensi. Yaitu implementatif, aplikatif, dalam perencanaan stratejik. Dalam hal ini ketiga dimensi menunjukkan kategori baik dan memadai.

Kata Kunci: Good Governance, Perencanaan Pembangunan, Penerapan Prinsip

Open Access at: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/rezpublica>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Konsep *good governance* tentunya tidak hanya perlu di aplikasikan di tingkat nasional, tetapi bahkan lebih penting lagi adalah di tingkat lokal. Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan perwujudan salah satu prasyarat yang dibutuhkan (*necessary*), tetapi bukan berarti bahwa regulasi ini sudah mencukupi (*sufficient*) bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Oleh karena itu, pemerintah daerah juga harus dapat membuka ruang bagi seluruh komponen masyarakat untuk dapat terlibat dalam seluruh proses pembangunan. Pelibatan tersebut membutuhkan beberapa prasyarat awal yang harus di implementasikan oleh pemerintah daerah sendiri, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban pemerintah yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab serta bebas KKN.

Menurut Sedarmayanti (2003), perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen serta tersedianya akses yang sama pada informasi masyarakat luas. Untuk mencegah agar kekuasaan politik, ekonomi, sosial dan budaya tidak dipegang oleh sekelompok elit daerah saja, maka dibutuhkan peranan media massa, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan masyarakat pada umumnya untuk memantau proses pengambilan keputusan, mempedulikan pekerjaan serta kinerja pemerintahan daerah, menuntut adanya transparansi, dan meminta aparat pemerintah daerah untuk dapat mempertanggungjawabkan amanat yang diembannya.

Dalam mewujudkan pertanggung jawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah (BKSI, 2001). Dari sini terlihat bahwa *good governance* tidaklah terbatas pada bagaimana pemerintah menjalankan wewenangnya dengan baik semata, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dan mengontrol pemerintah untuk menjalankan wewenang tersebut dengan baik (*accountable*). Karenanya, seringkali tata pemerintahan yang baik dipandang sebagai "sebuah bangunan dengan 3 tiang". Ketiga tiang penyangga itu adalah transparansi , akuntabilitas , dan partisipasi .

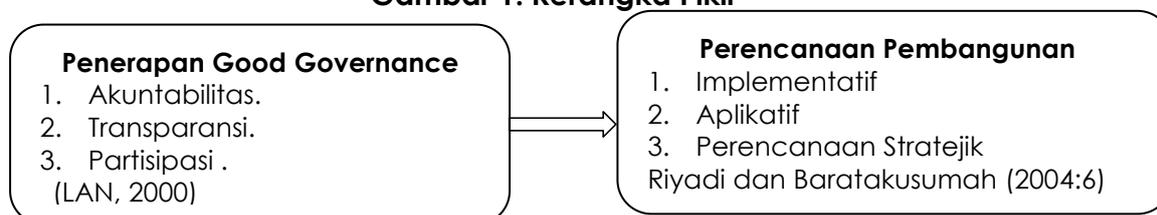
Secara konseptual, hubungan antara ketiga komponen tata pemerintahan yang baik itu mutualistik dan saling mendukung. Efektivitas dan efisiensi sumber daya dalam mencapai

tujuannya mensejahterakan bangsa menuntut tingkat akuntabilitas penyelenggara negara (pemerintah) yang relatif tinggi. Tanpa adanya partisipasi publik untuk mengamankan (*safe guard*) proses penyelenggaraan negara, sulit diharapkan akuntabilitas dan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Di lain pihak, partisipasi publik tidak mungkin dapat berjalan dengan efektif tanpa adanya hak publik untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Sebaliknya,transparansi sendiri tidak mungkin tercipta jika pemerintah tidak bertanggung gugat dan tidak ada jaminan hukum atas hak publik untuk mengakses berbagai informasi tersebut.

Banyak fenomena menarik dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan, terutama berkaitan dengan langkah ke 3 pada tahap pertama proses perencanaan pembangunan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 yang berbunyi: Melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang). Hal menarik tersebut antara lain: mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah yang dilaksanakan mulai musrenbang desa sampai kecamatan belum melibatkan masyarakat untuk memutuskan prioritas kegiatan, padahal untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dituntut adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan karena masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsertaan masyarakat dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Ada kecenderungan bahwa usulan yang diajukan dalam musrenbang kecamatan merupakan rumusan elite desa/kelurahan, sehingga partisipasi masyarakat yang sesungguhnya masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dilihat ketika proses musrenbang kecamatan tidak ada acara penentuan prioritas kegiatan dilakukan secara bersama-sama dalam forum, karena daftar usulan kegiatan sebagai hasil musrenbang yang akan di usulkan ke Kecamatan sudah di print out oleh pihak panitia.

Selain itu adanya kecenderungan tingkat kehadiran stakeholders penting dalam perencanaan pembangunan seperti kader pembangunan desa, tokoh adat, dan tokoh pemuda relatif rendah, serta tingkat keaktifan peserta relatif rendah. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah seorang peserta musbangdes bahwa kehadiran peserta dalam musbangdes tersebut semata-mata hanya memenuhi undangan pak lurah saja, sehingga kehadirannya lebih banyak sebagai pendengar sehingga penting untuk meneliti tentang "Penerapan Prinsip *Good Governance* Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari".

Gambar 1. Kerangka Pikir



METODOLOGI

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik suatu kesimpulan (Sugiono, 2003:90). Jadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari yang berjumlah 143 orang. Dalam pengambilan sampel, Arikunto (2000:112) berpendapat bahwa apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil seluruhnya hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika subyeknya lebih besar dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih dengan mempertimbangkan tingkat homogenitas populasi. Jadi dalam penelitian ini mengambil 25% dari jumlah populasi 143 orang sehingga menghasilkan nilai 35,75 dan digenapkan menjadi 36 orang. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 36 orang. Selain data yang diperoleh dari sampel-sampel yang didapat, dalam melengkapi data peneliti juga memperoleh informasi dari masyarakat luar atau unsur pemerintah yang mengetahui masalah yang dibahas.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data yang digunakan adalah Angket kuisisioner, Studi Dokumen Wawancara dan Observasi

Analisa data penelitian ini dilakukan simultan dengan menggunakan analisa kualitatif, yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan serta data primer yang diperoleh dari wawancara dianalisis dengan teori dan pendapat para pakar yang relevan sehingga didapat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip *Good Governance*

Dalam upaya menerapkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pada pemerintahan dapat ditinjau dari 3 prinsip pokok *Good Governance* yakni, Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

1. Akuntabilitas

Hasil penelitian tentang Tanggapan Responden Terhadap Adanya Kesesuaian Antara Pelaksanaan Dengan Standar Prosedur Pelaksanaan menunjukkan bahwa sebanyak 27 responden atau (75%) responden mengatakan setuju bahwa ada kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, sedangkan 25 % atau 9 responden mengatakan hanya sebahagian kegiatan yang berdasarkan standar prosedur pelaksanaan yang benar. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan standar prosedur pelaksanaan yang benar, yang dimana sebagai salah satu pendukung dalam menerapkan prinsip *Good Governance*

yaitu akuntabilitas. Kondisi ini relatif merata di setiap Sub-sub bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari.

Tanggapan Responden Terhadap Adanya Sanksi Yang Ditetapkan Atas Kesalahan Atau Kelalaian Dalam Pelaksanaan Kegiatan, menunjukkan bahwa sebanyak 21 responden atau 58.33% mengatakan ada sanksi yang di tetapkan atas kesalahan atau kelalaian pegawai dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari. Sedangkan 11 respoden (30.56%) lain mengatakan terkadang saja di berikan sanksi bila terjadi kesalahan atau kelalaian dan 4 responden (11.11%) yang lain mengatakan tidak ada pemberian sanksi yang di berikan dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari.

Hal ini di jelaskan pula oleh satu seorang informan penelitian yang menyatakan bahwa :

“Penetapan sanksi, di tetapkan agar semua aparat senantiasa sadar, lebih berhati-hati serta lebih bertanggung jawab dalam pelaksanaan setiap kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari “ (Hasil wawancara Kepala Bappeda, Oktober 2019)

Hal ini jelaslah telah memberikan gambaran bahwa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari, ada sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan setiap kegiatan.

Selanjutnya, tanggapan Responden Terhadap Terhadap Meningkatnya Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemerintah.

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 25 responden (69.44%) mengatakan puas dan percaya terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari.

Pemerintahan yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat salah satu faktor dari terciptanya akuntabilitas. Tanggapan Responden Terhadap Pemerintahan Yang Mampu Meningkatkan Kesadaran Masyarakat menunjukkan bahwa sebanyak 30 responden 83.33%), mengatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari mampu meningkatkan kesadaran masyarakat. Data tersebut di atas cukup memberikan gambaran bahwa Pemerintah mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dimana sebagai salah satu faktor terwujudnya prinsip akutabilitas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari. Hal ini dapat dibuktikan dengan Meningkatnya Keterwakilan Berdasarkan Pilihan Dan Kepentingan Masyarakat.yang menyatakan bahwa sebanyak 26 responden (72.22%) mengatakan setuju atas meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat. Data tersebut diatas sangat jelas memberikan gambaran bahwa meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari dijalankan dengan sangat baik.

Indikator – indikator yang terkhir dan yang paling penting dari prinsip akuntabilitas adalah berkurangnya kasus-kasus KKN. Indikator ini merupakan salah satu hal yang dapat kita gunakan dalam penerapan prinsip akuntabilitas. Sesuai hasil penelitian dengan

menggunakan angket maka distribusi jawaban responden terhadap berkurangnya kasus-kasus KKN di tampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Tanggapan Responden Terhadap Berkurangnya Kasus-Kasus KKN.

No.	Kategori Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Berkurang	28	77.78
2	Sebahagian Saja	8	22.22
3	Tidak Sama Sekali	0	0.00
	Jumlah	36	100

Sumber: data kuisisioner diolah, 2019

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 28 responden (77.78%) mengatakan setuju atas menurunnya kasus-kasus KKN pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari. Sedangkan 8 responden lain (22.22%) mengatakan sebahagian saja kasus-kasus KKN yang di berantas.

Data tersebut diatas menunjukan adanya penurunan tingkat kasus-kasus KKN pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari, sesuai yang di katakan salah satu informan bahwa :

“Kasus- kasus KKN yang terlihat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari terlihat menurun tetapi tidak mempengaruhi tingkat pengangguran di masyarakat. Masih banyak masyarakat yang tidak punya pekerjaan” (Hasil Wawancara salah satu Tokoh Masyarakat, Oktober 2019) .

2. Transparansi

Salah satu penilaian akan adanya transparansi adalah tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik. Sesuai hasil penelitian dengan menggunakan angket maka distribusi jawaban responden terhadap tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik di tampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Tanggapan Responden Terhadap Tersedianya Informasi Yang Memadai Pada Setiap Proses Penyusunan Dan Implementasi Kebijakan Publik

No.	Kategori Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Memadai	27	75.00
2	Kurang memadai	6	16.67
3	Tidak Memadai	3	8.33
	Jumlah	36	100

Sumber Data : Hasil Angket, di olah 2019

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 27 responden (75%) mengatakan setuju atas tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari. Sedangkan 6 responden lain (16.67%) mengatakan kurang memadai, dan 3

orang responden (8.33%) mengatakan tidak adanya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari.

Hal ini di jelaskan pula oleh informan penelitian ini yang mengatakan bahwa :

“Penyusunan implementasi publik dan media informasi yang bisa masyarakat dapatkan saat ini cukup memadai, informasi kegiatan pembangunan yang dapat kita temukan pada reklame-reklame yang dipajang dan masih banyak lagi yang dapat kita temukan di Kantor-Kantor pelayanan lain dibawah naungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari” (Hasil wawancara Sekretaris Bappeda, Oktober 2019).

Data tersebut diatas sangat jelas memberikan gambaran bahwa adanya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari.

Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu merupakan indikator selanjutnya terhadap penerapan prinsip good governance.

Sesuai hasil penelitian dengan menggunakan angket maka distribusi jawaban responden terhadap tersedianya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu di tampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Tanggapan Responden Terhadap Tersedianya Akses Pada Informasi Yang Siap, Mudah Dijangkau, Bebas Diperoleh, dan Tepat Waktu.

No.	Kategori Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Sangat Memadai	23	63.89
2	Kurang Memadai	13	36.11
3	Tidak Memadai	0	0.00
	Jumlah	36	100

Sumber: diolah, 2019

Data diatas menunjukkan bahwa sebanyak 23 responden (63.89%) mengatakan setuju atas tersedianya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari. Sedangkan 13 responden lain (36.11%) mengatakan kurang memadainya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.

Data tersebut diatas sangat jelas memberikan gambaran bahwa sangat tersedianya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari.

Wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan merupakan faktor pendukung transparansi dalam rangka mewujudkan Good Governance di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari.

Tanggapan Responden Terhadap Bertambahnya Wawasan Dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan menunjukkan bahwa sebanyak 27 responden (75%)

mengatakan setuju atas bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari.

Data tersebut diatas sangat jelas memberikan gambaran bahwa bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari cukup baik .

3. Partisipasi

Penerapan prinsip partisipasi dalam mewujudkan *Good Governance* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari dapat dilihat dari meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan.

Sesuai hasil penelitian dengan menggunakan angket maka distribusi jawaban responden terhadap meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan di tampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Tanggapan Responden Terhadap Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan

No.	Kategori Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Sangat Meningkatkan	29	80.56
2	Kurang Meningkatkan	7	19.44
3	Tidak Meningkatkan	0	0.00
	Jumlah	36	100

Sumber: Data Kuisisioner diolah 2019

Data diatas menunjukkan bahwa sebanyak 29 responden (80.56%) mengatakan setuju atas meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan. Sedangkan 4 responden lain (20%) mengatakan kurang meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan.

Selanjutnya, Tanggapan Responden Terhadap Aspirasi Masyarakat Di Dengar Dan Di Salurkan Sesuai Apa Yang Di Butuhkan Masyarakat menunjukkan bahwa sebanyak 25 responden (69.44%) mengatakan setuju akan aspirasi masyarakat yang di dengar dan di salurkan sesuai apa yang di butuhkan masyarakat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari.

Data tersebut diatas sangat jelas memberikan gambaran bahwa aspirasi masyarakat yang di dengar dan di salurkan sesuai apa yang di butuhkan masyarakat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari sudah cukup baik.

Berbicara masalah partisipasi jelas 3 domain *Good Governance* yakni; Negara, swasta dan masyarakat adalah pokok pembahasan yang berpartisipasi. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam setiap program pembangunan pemerintah merupakan point yang di bahas dalam prinsip partisipasi.

Hasil penelitian Keterlibatan Masyarakat dan Sektor Swasta Dalam Setiap Program Pembangunan Pemerintah menunjukkan bahwa sebanyak 23 responden (63.89%) mengatakan setuju adanya keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam setiap program pembangunan pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari.

Data tersebut diatas telah jelas memberikan gambaran bahwa keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam setiap program pembangunan pemerintah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari sudah dalam penilaian baik.

Berdasarkan data pada indikator-indikator 3 prinsip *Good Governance* diatas (akuntabilitas, transparansi dan partisipasi) diatas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa penerapan *Good Governance* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari relatif baik berdasarkan Prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

Efektivitas Perencanaan Pembangunan

Efektivitas perencanaan pembangunan adalah suatu proses dimana organisasi birokrasi dan masyarakat mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian mereka merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup, dapat dilihat pada beberapa dimensinya sebagai berikut:

1. Implementatif

Implikasi adalah sejauh mana perencanaan yang dilakukan memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan secara politis berimplikasi terhadap terpilihnya identitas etnik dan agama. Dalam dimensi ini, hal yang bisa diukur adalah sejauh mana pengaruh perencanaan pembangunan dapat menyentuh keinginan masyarakat di Kota Kendari.

Implikasi dapat diukur menggunakan indikator perencanaan pembangunan dengan prioritas kepada masyarakat setempat dapat menyentuh keinginan masyarakat. Berikut disajikan tabel tanggapan responden tentang perencanaan pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari dengan prioritas kepada masyarakat setempat dapat menyentuh keinginan masyarakat.

Tabel 5. Tanggapan Responden Tentang Perencanaan Pembangunan Dengan Prioritas Kepada Masyarakat Setempat

No.	Kategori Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Menyentuh	24	66.67
2	Cukup Menyentuh	9	25.00
3	Kurang menyentuh	3	8.33
	Jumlah	36	100

Sumber : Hasil isian angket (diolah), 2019

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 24 orang responden atau 66.67% mengatakan bahwa perencanaan pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari yang dilakukan sudah dapat menyentuh keinginan masyarakat, kemudian sebanyak 9 responden atau 25% menyatakan perencanaan

pembangunan yang dilakukan cukup menyentuh apa yang diinginkan masyarakat. Dan sebanyak 3 responden atau 8.33% menyatakan yang dilaksanakan kurang menyentuh keinginan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan di Bappeda Kota Kendari.

2. Aplikatif

Aplikatif adalah suatu tindakan atau pelaksanaan yang siap diterapkan atau direalisasikan. Penerap dari rencana pembangunan yang telah disepakati. Efektivitas Perencanaan pembangunan yang dilakukan yang telah diputuskan dalam rapat perencanaan pembangunan harus sepenuhnya dilaksanakan, bukan hanya sebagai usul saja. Sebab perencanaan pembangunan yang telah diputuskan saat rapat, sangat dinanti oleh masyarakat dalam pelaksanaannya.

Aplikatif dapat juga diukur menggunakan indikator tentang pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari. Berikut disajikan tabel tanggapan responden tentang pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan pembangunan sebagai berikut :

Tabel 6. Tanggapan Responden Tentang Kesesuaian Tentang Pelaksanaan Kegiatan dengan Perencanaan Pembangunan

No.	Kategori Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Sesuai	18	50.00
2	Cukup sesuai	14	38.89
3	Kurang sesuai	4	11.11
	Jumlah	36	100

Sumber : Hasil isian angket (diolah), 2019

Data di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari dapat dinyatakan dalam kategori sesuai. Dimana sebanyak 18 orang responden atau (50%) menyatakan sesuai. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari sudah relevan dengan apa yg direncanakan oleh pembangunan pemerintah.

Berdasarkan tanggapan responden diatas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan. Walaupun ada yang belum sepenuhnya dilaksanakan, hal ini dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya adalah adanya kegiatan atau yang harus diutamakan dari yang telah direncanakan, sehingga pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan ditunda untuk sementara waktu.

3. Perencanaan Stratejik

Perencanaan stratejik adalah suatu perencanaan yang disusun secara sistematis sehingga mudah dalam pelaksanaannya. Perencanaan yang stratejik yang dimanaksud dalam penelitian ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari. Prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan pembangunan pemerintah setempat

sebaiknya tidak menyusahkan pengambilan kebijakan dalam menentukan kebijakan sehingga pembangunan di Kota Kendari dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Selain itu, perencanaan stratejik dapat diartikan sebagai langkah-langkah atau mekanisme pelaksanaan pembangunan artinya bahwa dalam kegiatan proses pelaksanaan pembangunan sesuai kebutuhan. Jadi, berikut disajikan tabel tanggapan responden tentang mekanisme dalam kegiatan proses pelaksanaan pembangunan sesuai kebutuhan sebelum dilakukan pembangunan oleh pemerintah Kota Kendari. Ini merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana prosedur yang diterapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari.

Adapun tanggapan responden terhadap mekanisme dalam kegiatan proses perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Tanggapan Responden Tentang Mekanisme Dalam Kegiatan Proses Pelaksanaan Pembangunan

No.	Kategori Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Baik	20	55.56
2	Cukup Baik	13	36.11
3	Kurang Baik	3	8.33
	Jumlah	36	100

Sumber Data: Hasil olah kuesioner (Diolah) 2019

Data di atas dijelaskan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari sudah dapat dinyatakan dalam kategori baik. Dimana sebanyak 20 orang responden atau 55.56% menyatakan dalam kategori baik. Dalam arti bahwa prosedur atau mekanisme perencanaan pelaksanaan pembangunan tidak berbelit-belit sehingga memudahkan memperlancar pembangunan yang telah direncanakan. Sedangkan 13 orang atau 36.11% menyatakan dalam kategori cukup baik, dalam arti bahwa mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan sudah tidak berbelit-belit, tetapi terkadang ada sebagian mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan yang kadang membuat masyarakat merasa menyusahkan. Selanjutnya sebanyak 3 orang responden atau 8.33%, menyatakan bahwa mekanisme pelaksanaan pembangunan yang ada dalam kategori kurang baik, dalam arti bahwa mekanisme perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari sangat berbelit-belit bagi masyarakat.

Dengan prosedur perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan yang tidak berbelit-belit mudah untuk dipahami, maka akan berdampak keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di Kota Kendari.

Hal tersebut di atas didukung oleh wawancara dengan Sekretaris Bappeda, menyatakan bahwa:

"kami telah memberikan pembangunan yang cukup baik tentang prosedur perencanaan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat sehingga koordinasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sehingga hasilnya dapat dirasak oleh seluruh masyarakat." (Wawancara, Oktober 2019).

Kemudian hasil wawancara kami kepada Tokoh Masyarakat sebagai berikut:

"Perencanaan Pembangunan yang dilakukan tidak berbelit-belit dalam mekanisme perencanaan pembangunan. Bagi masyarakat yang mempunyai pendidikan yang tinggi jelas tidak akan berdampak buruk. Tetapi bagi masyarakat yang berpendidikan rendah akan merasa menyusahakan dalam perencanaan pembangunan hal ini disebabkan karena tingkat pembangunan pemahaman masyarakat berbeda-beda (Wawancara, Oktober 2019)".

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan yang diterapkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari tidak berbelit-belit dan memudahkan masyarakat dapat memberikan dampak positif terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat yang menganggap tidak berbelit-belit dalam perencanaan pembangunan dan akan mendukung sepenuhnya perencanaan pembangunan karena mereka memahami apa yang direncanakan dan apa yang harus dilakukan berikutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari di tinjau dari 3 prinsip pokok *Good Governance* yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipasi sudah cukup baik. Artinya bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari Sudah menerapkan *Good Governance* atau pemerintahan yang baik.
2. Efektivitas perencanaan pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari sudah memenuhi tiga dimensi. Yaitu implementatif, aplikatif, dalam perencanaan strategik. Dalam hal ini ketiga dimensi menunjukkan kategori baik dan memadai.

SARAN

Sebagai saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada seluruh aparat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari agar tetap mempertahankan dan meningkatkan penerapan *Good Governance* (Pemerintahan Yang Baik) sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

2. Perlu adanya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kota Kendari pada umumnya dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Akuntabilitas dan *Good Governance*". Jakarta: LAN dan BPKP

Forum Inovasi dan Pemerintahan yang Baik, Universitas Indonesia. Depok, 12 Oktober 2006.
<http://www.goodgovernance.or.id/>

Isra, Saldi. 2006. Reformasi Hukum Tata Negara. Padang: Andalas Univ. Press.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000.

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja

Mencari Format Dan Konsep Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Disajikan pada seminar "Menciptakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Memberdayakan Momentum Reformasi".

Max Pohan. Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (Local Good Governance) dalam Era Otonomi Daerah. Disampaikan pada Musyawarah Besar Pembangunan Musi Banyuasin ketiga, Sekayu, Oktober 2000.

Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.

Otonomi Daerah Ciptakan Raja Kecil ". KOMPAS, 19 Februari 2000.33

Rochman, Meuthia Ganie. Good Governance dan Tiga Struktur Komunikasi Rakyat dan Pemerintah . Makalah yang disajikan pada Seminar " Good Governance dan Reformasi Hukum" di Jakarta, Agustus 1998.
<http://www.geocities.com/arsipda/makalah/reorganisasi.htm>

Rosdakarya. Mr. H. Mustamin DG. Matutu dkk. 1999. Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.

Salamm, Alfitra. 2005. Menimbang Kembali Kebijakan Otonomi Daerah . Jakarta: LIPI.

Sedarmayanti. 2003. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah . Bandung: Mandar Maju.

Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabeta.

Soejito, Irawan. 1990. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Rineka Cipta.

Solihin, Dadang. 2007. Pengukuran Good Governance Index . Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik -BAPPENAS.

Syaukani HR., Afan Gaffar dan Ryas Rasyid. 2002. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (revisi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999) BKSJ.

Wasistiono, Sadu. 2003. Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Fokus Media.

Widodo, Joko. 2001. Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah). Surabaya: Insan Cendekia